

**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan  
di Provinsi Kalimantan Selatan**

*(Analysis of Factors Affecting Development Disparities  
in South Kalimantan Province)*

**Nadya Cinthya**

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin  
[nadyacinthya1996@gmail.com](mailto:nadyacinthya1996@gmail.com)

**Abstract**

*This research is conducted to (1) find out whether the content of natural resources, demographic condition, mobility of goods and services, the concentration of economic activity, and development fund allocation together significantly influence the development inequality in South Kalimantan Province; (2) to know the most dominant factor influencing development disparity in South Kalimantan Province. The technique of data analysis in this research is Williamson index analysis and panel data regression analysis with the Fixed Effect model.*

*The result of panel data regression states that natural resource content, demographic condition, mobility of goods and services, the concentration of economic activity, and development fund allocation have a significant effect on development disparity in South Kalimantan Province. The demographic condition factor is the most dominant factor affecting development disparity in South Kalimantan Province in 2012-2016.*

*Keywords: Development Disparity, Natural Resource Content, Demographic Condition, Mobility of Goods and Services, Concentration of Economic Activity, Development Fund Allocation.*

**Abstraksi**

Penelitian ini dilakukan untuk (1) mengetahui kandungan SDA, kondisi demografis, mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi dan alokasi dana pembangunan secara bersama berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan; (2) mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi ketimpangan pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisis indeks Williamson dan analisis regresi data panel dengan model *Fixed Effect*.

Hasil regresi data panel menyatakan bahwa kandungan SDA, kondisi demografis, mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi dan alokasi dana pembangunan secara bersama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Faktor kondisi demografis merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2016.

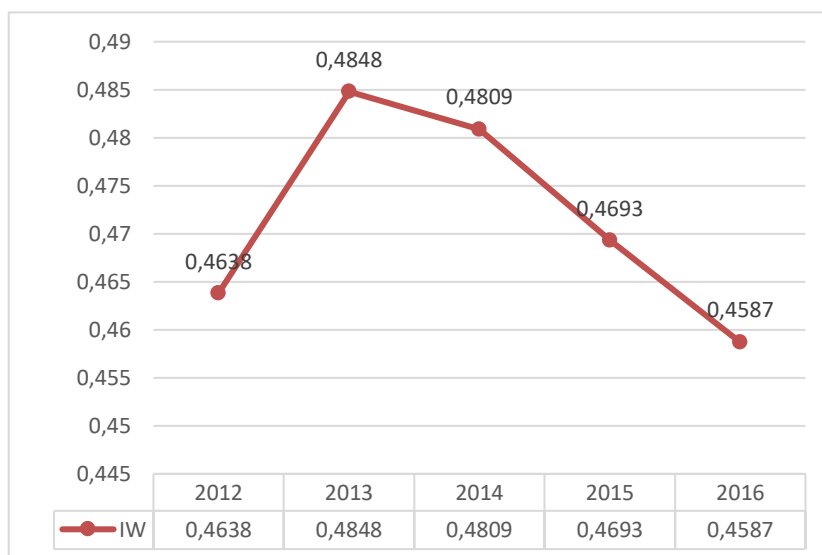
**Kata kunci :** Ketimpangan Pembangunan, Kandungan SDA, Kondisi Demografis, Mobilitas Barang dan Jasa, Konsentrasi Kegiatan Ekonomi, Alokasi Dana Pembangunan.

## PENDAHULUAN

Ketimpangan pembangunan daerah dapat menyebabkan munculnya daerah maju dan daerah terbelakang, namun ketimpangan pembangunan tidak selalu menjadi masalah yang harus dikhawatirkan karena pada tingkat ketimpangan yang rendah justru kondisi ini akan memicu daerah-daerah terbelakang untuk mendorong pembangunan daerahnya agar tidak semakin tertinggal dengan daerah maju.

Tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan dapat dilihat melalui grafik dibawah ini :

**Grafik 1.1**  
**Tingkat Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan**  
**Tahun 2012-2016 (Indeks Williamson)**



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kandungan sumber daya alam, kondisi demografis, mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi dan alokasi dana pembangunan secara bersama berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan serta mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi ketimpangan pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

## KAJIAN PUSTAKA

### Landasan Teori

#### Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah

Menurut Arsyad (2016) ketimpangan pembangunan diukur menggunakan indeks Williamson yang dikemukakan oleh Jeffrey G. Williamson (1965).

Berikut formulasi indeks Williamson :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i/n}}{Y}$$

Sumber : Kuncoro, 2004

#### Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan

Menurut Sjafrizal (2008) ketimpangan pembangunan disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. perbedaan kandungan sumber daya alam
2. perbedaan kondisi demografi
3. kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa
4. konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah
5. alokasi dana pembangunan antar wilayah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan pembangunan yang ada di 13 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

Penelitian ini memerlukan definisi operasional variabel untuk menghindari salah pengertian dalam penulisan serta mencegah meluasnya permasalahan :

1. Ketimpangan Pembangunan (Y) digunakan sebagai variabel dependen. Variabel ini merupakan hasil perhitungan dari Indeks Williamson dengan satuan indeks Williamson (IW)
2. Kandungan SDA (X1) yang dimaksud dalam penelitian ini dilihat dari PDRB sektor sumber daya alam dengan satuan rupiah (Rp)
3. Kondisi Demografis (X2) yang dimaksud dalam penelitian ini menggunakan data laju pertumbuhan penduduk dengan satuan persen (%)
4. Mobilitas Barang dan Jasa (X3) yang dimaksud dalam penelitian ini menggunakan data jumlah angkutan barang dan jasa dengan satuan unit.
5. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi (X4) yang dimaksud dalam penelitian ini menggunakan data jumlah pasar dengan satuan unit.
6. Alokasi Dana Pembangunan (X5) yang dimaksud dalam penelitian ini menggunakan data Dana Perimbangan dengan satuan rupiah (Rp).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### **Teknik Analisa Data**

Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel. Menurut (Nachrowi dan Usman, 2006) maka teknik analisis datanya :

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N x T = banyaknya data panel

Berdasarkan teknik tersebut maka dibuat teknik regresi estimasi dalam penelitian ini :

Catatan : 
$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \varepsilon_{it}$$

$Y_{it}$  = Ketimpangan Pembangunan (indeks williamson)

$X_1$  = Kandungan Sumber Daya Alam (Rp)

$X_2$  = Kondisi Demografis (%)

$X_3$  = Mobilitas Barang dan Jasa (Unit)

$X_4$  = Konsentrasi Kegiatan Ekonomi (Unit)

$X_5$  = Alokasi Dana Pembangunan (Rp)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  = Koefisien Regresi  
 $\varepsilon$  = Komponen kesalahan  
*i* = Kabupaten/ Kota Di Provinsi Kalimantan selatan (*i* = 1, 2, 3... 13)  
*t* = 1, 2,3,...5 Tahun

**Uji Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini dibuktikan dengan cara melakukan Uji F dan Uji t. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar proporsi atau presentasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Gujarati, 2013). Kemudian dilakukan Uji Koefisien Korelasi (R) untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Gujarati, 2013).

**HASIL DAN ANALISIS**

**Pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM)**

**Tabel 1.1**  
**Hasil Analisis Regresi Data Panel**  
**Estimasi dengan *Fixed Effect Model* (FEM)**

Uji Statistik		Hasil
Sumber : Lampiran Output Eviews 9	<i>R-Square</i> ( $R^2$ )	0,992331
	<i>Adjusted R-square</i>	0,989558
	<i>F-statistic</i> ( <i>F</i> hitung)	357,7609
	<i>Probabilitas</i> ( <i>F-statistic</i> )	0,000000
	<i>Probabilitas</i> X1	0,7462
Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan maka persamaan regresi data panel sebagai berikut : $\hat{Y}_i$	<i>Probabilitas</i> X2	0,0055
	<i>Probabilitas</i> X3	0,8049
	<i>Probabilitas</i> X4	0,2251
	<i>Probabilitas</i> X5	0,0516
	<i>t-statistic</i> X1	0,325505
	<i>t-statistic</i> X2	2,911196
	<i>t-statistic</i> X3	0,248363
	<i>t-statistic</i> X4	1,229139
	<i>t-statistic</i> X5	-1,996932
	<i>Coefficient konstanta</i>	0,092318
<i>Coefficient</i> X1	0,000000000158	
<i>Coefficient</i> X2	0,005527	
<i>Coefficient</i> X3	0,000000643	
<i>Coefficient</i> X4	0,000361	
<i>Coefficient</i> X5	-0,000000000160	

$$\hat{Y}_i = 0,092318 + 0,000000000158X_{1it} + 0,005527X_{2it} + 0,000000643X_{3it} + 0,000361X_{4it} - 0,000000000160X_{5it}$$

Nilai konstanta  $\alpha = 0,092318$  menyatakan bahwa jika nilai variabel X (kandungan sumber daya alam (X1), kondisi demografis (X2), mobilitas barang dan jasa (X3), konsentrasi kegiatan ekonomi (X4), dan alokasi dana pembangunan (X5) ) adalah konstan (0) maka variabel Y (ketimpangan pembangunan) akan tetap sebesar 0,092318.

Selanjutnya hasil regresi dengan program *Eviews 9* digunakan untuk menjelaskan perubahan variabel dependen yang dipengaruhi oleh masing-masing variabel independen :

**1) Kandungan SDA (X1)**

Variabel independen X1 (kandungan sumber daya alam) memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0,000000000158. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi penambahan sebanyak 1 juta rupiah kandungan sumber daya alam maka ketimpangan pembangunan akan meningkat sebesar 0,000000000158 dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*).

**2) Kondisi Demografis (X2)**

Variabel independen X2 (kondisi demografis) memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0,005527. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan sebesar 1 persen pada kondisi demografis maka ketimpangan pembangunan akan meningkat sebesar 0,005527 dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*).

**3) Mobilitas Barang dan Jasa (X3)**

Variabel independen X3 (mobilitas barang dan jasa) memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0,000000643. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan sebesar 1 unit pada mobilitas barang dan jasa maka ketimpangan pembangunan akan meningkat sebesar 0,000000643 dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*).

**4) Konsentrasi Kegiatan Ekonomi (X4)**

Variabel independen X4 (konsentrasi kegiatan ekonomi) memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0,000361. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan sebesar 1 unit pada konsentrasi kegiatan ekonomi maka ketimpangan pembangunan akan meningkat sebesar 0,000361 dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*).

**5) Alokasi Dana Pembangunan (X5)**

Variabel independen X5 (alokasi dana pembangunan) memiliki nilai koefisien yang negatif sebesar -0,000000000160. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan sebesar 1 juta rupiah pada alokasi dana pembangunan maka ketimpangan pembangunan akan menurun sebesar 0,000000000160 dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*).

**Uji Simultan (Uji F)**

Berdasarkan tabel 1.1 hasil regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa p-value atau nilai probabilitas F adalah 0,000000 yang berarti bahwa probabilitas  $F < 5\%$  (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusannya  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima yang berarti hasil tersebut menyatakan bahwa kandungan sumber daya alam (X1), kondisi demografis (X2), mobilitas barang dan jasa (X3), konsentrasi kegiatan ekonomi (X4), dan alokasi dana pembangunan (X5) secara bersama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan (Y) di Provinsi Kalimantan Selatan.

**Uji Parsial (Uji t)**

Tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat melalui nilai probabilitas t dari setiap variabel independen pada hasil regresi data panel dengan alpha atau taraf nyata 5%. Jika p-value atau nilai probabilitas  $t < 5\%$  maka menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui nilai dari masing-masing  $t_{hitung}$  namun nilai  $t_{tabel}$  belum diketahui karena itu untuk menghitung nilai  $t_{tabel}$  dapat menggunakan bantuan program *Microsoft Excel* dengan rumus  $=TINV(0.05,df)$  dimana 0,05 adalah alpha atau taraf nyata 5% dan df atau *degree of freedom* merupakan hasil n-k (jumlah

observasi dikurangi jumlah variabel bebas dan terikat) sehingga didapatkan hasil perhitungan  $t_{tabel}$  adalah -2,000995.

Hasil regresi kondisi demografi terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan diperoleh dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  -2,911196 >  $t_{tabel}$  -2,000995 dan berdasarkan nilai probabilitas yaitu  $0,0055 < 0,05$ . Dengan demikian keputusannya adalah  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima yang berarti bahwa kondisi demografis berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan secara individu atau parsial.

Berdasarkan hasil regresi diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi demografis merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Hasil perhitungan dengan indeks Williamson dapat dilihat bahwa keadaan ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan selama 5 tahun terakhir berada pada angka rata-rata 0,4715. Pada tahun terakhir 2016 tingkat ketimpangan Provinsi Kalimantan Selatan berada pada angka 0,4587.

Tingkat ketimpangan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan berada pada angka rata-rata 0,4715 artinya tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan berada pada golongan sedang.

Tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan yang rendah harus tetap dipertahankan, hal ini karena menurut hipotesa Neo-Klasik ketimpangan pembangunan pada suatu daerah yang masih berkembang akan cenderung meningkat bahkan prosesnya akan terjadi hingga titik puncak baru setelah itu ketimpangan akan berangsur-angsur turun seiring dengan terus berjalannya proses pembangunan di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel menunjukkan bahwa semua faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* seluruh faktor-faktor yang dikemukakan oleh Sjafrizal berpengaruh secara bersama (simultan) terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Keadaan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan pada sektor-sektor sumber daya alam di setiap kabupaten/kota yang meliputi sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian, dan industri pengolahan. Setiap kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sektor unggulan yang berbeda-beda. Kabupaten Tanah Laut, Banjar, Tapin, Tabalong, Tanah Bumbu, dan Balangan merupakan daerah yang memiliki keunggulan pada sektor pertambangan dan penggalian terbukti dari besarnya jumlah yang mereka sumbangkan terhadap produk domestik regional bruto melalui sektor tersebut. Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara merupakan daerah yang memiliki sektor unggul pada bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan hal ini juga dilihat dari besarnya sumbangsih daerah ini terhadap produk domestik regional bruto sektor sumber daya alam. Sedangkan, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Kotabaru memiliki sektor unggulan pada bidang industri pengolahan yang dilihat dari besarnya sumbangsih daerah ini terhadap produk domestik regional bruto sektor sumber daya alam.

Hasil penelitian mengemukakan fakta bahwa semakin tingginya eksploitasi terhadap kandungan sumber daya alam maka akan meningkatkan ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini berhubungan dengan masalah perizinan sumber daya alam dimana masih terdapat pelanggaran/ penyimpangan

terutama dibidang pertambangan dan kehutanan sehingga banyak kawasan lindung yang sudah berubah menjadi pemukiman, perkebunan, maupun pertambangan.

Dampak dari pelanggaran/ penyimpangan terhadap perizinan ini tentunya membuat pemerintah juga kesulitan untuk melakukan kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya alam sehingga tidak diketahui seberapa besar jumlah sumber daya alam yang sudah di eksploitasi tersebut.

Eksplorasi terhadap sumber daya alam tertentu yang tidak berada dalam pengawasan pemerintah dapat menyebabkan semakin tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah selaku pemberi izin dapat segera menghentikan atau mencabut izin jika terdapat pelanggaran/ penyimpangan dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemerintah juga dapat meningkatkan produktivitas hasil sumber daya alam secara merata dengan melihat keunggulan komparatif masing-masing wilayahnya. Daerah yang telah mengetahui sektor unggulnya dapat melakukan kerjasama seperti mempermudah distribusi bahan baku ke daerah lain sehingga daerah tersebut dapat menjual kembali hasil produksi kepada daerah lain begitu seterusnya hingga menjadi perputaran roda ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian maka ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat diturunkan.

Penyebab lain yang menimbulkan ketimpangan pembangunan adalah kondisi demografis. Berdasarkan hasil penelitian kondisi demografis merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi ketimpangan pembangunan secara signifikan jika dilihat pengaruhnya secara parsial/ individu. Dampak dari meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya di Provinsi Kalimantan Selatan menyebabkan suatu daerah menjadi sangat padat. Hal ini juga berdampak pada jumlah PDRB perkapita dimana kita ketahui bahwa sekalipun terjadi peningkatan terhadap PDRB jika diiringi dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk maka hasil PDRB perkapita tidak akan bertambah.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah harus lebih menggalakkan program-program dan kebijakan yang dapat menekan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan. Sejauh ini program yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah tepat yaitu melaksanakan program KB bahkan saat ini telah ada “Kampung KB” yang tersebar di 11 kabupaten/ kota kecuali Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Banjar. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Banjar termasuk daerah yang cukup besar di Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah kecamatan di Kabupaten Banjar ada 19 kecamatan dengan total 277 desa. Dilihat dari jumlah penduduknya, Kabupaten Banjar memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 563.100 jiwa. Karena itu pemerintah perlu kembali menggalakan program ini agar daerah-daerah seperti Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat ikut menjalankan program tersebut demi menekan laju pertumbuhan penduduk agar ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat diturunkan.

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan menyebabkan terjadinya ketimpangan terhadap pembangunan. Daerah dengan tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi tertinggi adalah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu. Karena itu pemerintah diharapkan dapat mendorong dan memfokuskan arah kebijakan sehingga masyarakat yang berada di daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonomi masih rendah dapat lebih mengembangkan sektor-sektor unggulan pada setiap kabupaten/ kota yang ada. Selain itu pemerintah juga

dapat mendorong pembentukan sistem kerjasama yang saling menguntungkan antar daerah sehingga proses kegiatan ekonomi dapat optimal dengan tetap mengandalkan sektor-sektor unggulan dan produktif.

Faktor lainnya yang menyebabkan ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan adalah mobilitas barang dan jasa. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam kegiatan dan aktifitas ekonomi tentunya akan lebih cepat mendorong pertumbuhan dan pergerakan kegiatan ekonomi di suatu daerah.

Kelancaran mobilitas barang dan jasa tidak terlepas dari infrastruktur yang memadai seperti pembangunan jalan, jembatan, terminal, dan infrastruktur penunjang lainnya. Pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan keadaan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan sarana-prasarana yang lebih dapat memudahkan mobilitas.

Sesuai dengan visi-misi Presiden Republik Indonesia Ir. H. Jokowi yang ingin memajukan Indonesia melalui pembangunan infrastruktur maka pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga dapat melakukan percepatan pembangunan pada daerah-daerah tertinggal yang sulit berhubungan langsung dengan kegiatan perekonomian. Pemerintah juga diharapkan dapat mempermudah akses transportasi seperti angkutan umum antar wilayah agar arus perdagangan menjadi lancar sehingga tidak terjadi masalah dalam kelancaran mobilitas barang dan jasa.

Alokasi dana pembangunan merupakan faktor yang juga mempengaruhi ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut hasil penelitian faktanya alokasi dana terhadap pembangunan terbukti menurunkan ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Artinya alokasi dana tersebut telah memiliki dampak terhadap kemajuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, berdasarkan data yang ada pada realisasi pengeluaran pemerintah lebih banyak dikeluarkan untuk belanja pegawai.

Karena itu, pemerintah seharusnya dapat lebih memprioritaskan alokasi dananya untuk pembangunan seperti infrastruktur baik itu pembangunan jalan, jembatan, terminal, penyediaan angkutan umum dan infrastruktur penunjang lainnya agar dapat membantu kelancaran mobilitas barang dan jasa. Dengan demikian maka konsentrasi kegiatan ekonomi tidak akan hanya terjadi disuatu daerah namun dapat didistribusikan secara lebih merata.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah di 13 kabupaten/ kota Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2016 yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan yang dihitung menggunakan indeks Williamson mengalami fluktuasi dan berada pada golongan ketimpangan sedang. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2012-2016 adalah kandungan sumber daya alam, kondisi demografis, mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi, dan alokasi dana pembangunan. Kondisi demografis merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah di 13 kabupaten/ kota Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2016 yang telah dilakukan, maka peneliti



memberikan beberapa saran-saran yang dapat dipertimbangkan yaitu pemerintah daerah dapat meningkatkan produktivitas hasil sumber daya alam secara merata dengan melihat keunggulan komparatif masing-masing wilayahnya. Daerah yang telah mengetahui sektor unggulannya dapat melakukan kerjasama seperti mempermudah distribusi bahan baku ke daerah lain sehingga daerah tersebut dapat menjual kembali hasil produksi kepada daerah lain begitu seterusnya hingga menjadi perputaran roda ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah selaku pemberi izin dapat segera menghentikan atau mencabut izin jika terdapat pelanggaran/ penyimpangan dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemerintah harus lebih menggalakkan program-program dan kebijakan yang dapat menekan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan seperti program KB (keluarga berencana) terutama untuk daerah-daerah padat penduduk.

Pemerintah diharapkan dapat mendorong dan memfokuskan arah kebijakan sehingga masyarakat yang berada di daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonomi masih rendah dapat lebih mengembangkan sektor-sektor unggulan pada setiap kabupaten/ kota yang ada. Selain itu pemerintah juga dapat mendorong pembentukan sistem kerjasama yang saling menguntungkan antar daerah sehingga proses kegiatan ekonomi dapat optimal dengan tetap mengandalkan sektor-sektor unggulan dan produktif.

Sesuai dengan visi-misi Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo yang ingin memajukan Indonesia melalui pembangunan infrastruktur maka pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga dapat melakukan percepatan pembangunan pada daerah-daerah tertinggal yang sulit berhubungan langsung dengan kegiatan perekonomian. Pemerintah juga diharapkan dapat mempermudah akses transportasi seperti angkutan umum antar wilayah agar arus perdagangan menjadi lancar sehingga tidak terjadi masalah dalam kelancaran mobilitas barang dan jasa.

Pemerintah harus dapat lebih memprioritaskan alokasi dananya untuk pembangunan seperti infrastruktur baik itu pembangunan jalan, jembatan, terminal, penyediaan angkutan umum dan infrastruktur penunjang lainnya agar dapat membantu kelancaran mobilitas barang dan jasa. Dengan demikian maka konsentrasi kegiatan ekonomi tidak akan hanya terjadi di suatu daerah namun dapat didistribusikan secara lebih merata.

#### **Keterbatasan Penelitian:**

Dalam penulisan penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh penulis yaitu alat ukur yang dapat digunakan dalam mengukur ketimpangan ada beberapa seperti Entrophy Theil, Gini Ratio dan lain sebagainya. Namun, alat yang digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan wilayah dalam penelitian ini hanya menggunakan indeks Williamson. Karena itu dalam penelitian selanjutnya dapat digunakan metode lain. Penelitian ini hanya melihat kondisi ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan, karena itu untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan indeks kebahagiaan (*index of happiness*) untuk mengetahui tingkat kebahagiaan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Faktor-faktor yang digunakan penelitian ini dalam menganalisis penyebab ketimpangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan hanya menggunakan 5 faktor yaitu kandungan sumber daya alam, kondisi demografis, mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi, dan alokasi dana pembangunan.

Data yang digunakan dalam menggambarkan mobilitas barang dan jasa dalam penelitian ini hanya menggunakan jumlah angkutan barang dan jasa (termasuk jumlah angkutan orang) yang telah membayar PKB (pajak kendaraan bermotor) dan BBN-KB (bea balik nama kendaraan bermotor) di samsat Provinsi Kalimantan Selatan sehingga bukan jumlah seluruh angkutan barang dan jasa yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Arsyad, Lincolin. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Damodar N. Gujarati and Dawn C. Porter (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat
- Kuncoro, Mudrajat. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Nachrowi, Djalal Nachrowi, Hardius Usman (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Jakarta: UI
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.